

STRATEGI PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM UPAYA MENANAMKAN NILAI-NILAI MORAL DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PELEPAT ILIR

Sulastri

SMP N 4 Pelepat Ilir, Bungo, Jambi

Abstract

The development of learning in the classroom plays an important role in efforts to develop character, moral values, and student learning outcomes. Development efforts must be carried out in a continuous manner, paying attention to the needs of students in learning. This paper aims to describe the learning strategy of citizenship education (PKN) for junior high school students to instill moral values in education, which will later be used as a further step in conducting classroom action research in school, especially in junior high school.

Kata Kunci: Strategi, Pendidikan Kewarganegaraan, nilai moral, hasil belajar, karakter

PENDAHULUAN

Visi reformasi pembangunan yang terdapat dalam Undang-Undang dasar 1945 adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang berkualitas (E. Mulyasa, 2005:3). Apalagi dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas yang menghadapkan manusia pada perubahan yang tidak menentu. Perwujudan masyarakat berkualitas tersebut menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subyek yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang

tanggung, kreatif, mandiri dan profesional pada bidangnya masing-masing.

Kualitas sumber daya manusia yang baik sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Sedangkan kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran karena proses pembelajaran merupakan bagian yang paling pokok dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Pembelajaran adalah suatu proses mengatur dan mengorganisasikan lingkungan sekitar sehingga siswa memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Dalam proses pembelajaran diperlukan adanya hubungan timbal balik antara guru dan siswa sehingga terjalin komunikasi dua arah yang menjadikan pembelajaran

terarah pada pencapaian kompetensi. Guru harus mampu memahami beberapa hal dari peserta didik seperti kemampuan, potensi, minat, hobi, sikap, kepribadian, kebiasaan, catatan kesehatan, latar belakang keluarga, dan kegiatannya di sekolah.

Disamping pelaksanaan proses pembelajaran dalam suasana komunikasi dua arah, diharapkan siswa juga dapat melakukannya dalam suasana komunikasi multi arah. Dalam proses pembelajaran seperti ini hubungan tidak hanya terjadi antara seorang guru dengan siswa dan sebaliknya, tetapi juga antara siswa-siswa lainnya (Muhibbin Syah, 2005: 238). Secara umum keberhasilan proses pembelajaran sangat ditentukan oleh beberapa komponen. Komponen tersebut antara lain: siswa, lingkungan, kurikulum, guru, metode dan media mengajar dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Siswa merupakan generasi penerus bangsa yang perlu distimulasi sesuai dengan perkembangan fisik dan psikologis. Sel-sel otak yang dimiliki siswa tidak akan mampu berkembang secara optimal jika stimulus yang diberikan tidak tepat dan tidak mendukung perkembangannya. Stimulus

yang diberikan kepada siswa dapat melalui pendidikan di sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar. Hal ini karena, pendidikan merupakan sarana proses mendidik dan sarana mentransfer ilmu pengetahuan yang berperan dalam mewariskan budaya dari satu generasi kepada generasi berikutnya, untuk mempersiapkan siswa agar bisa menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat secara maksimal dan bisa bermanfaat bagi masa depannya.

Karakter merupakan hal sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa. Di sisi lain, karakter tidak datang dengan sendirinya, namun harus dibangun dan dibentuk untuk menjadikan suatu bangsa bermartabat (Pemerintah Republik Indonesia, 2010:3). Uraian tersebut meninggalkan pesan bahwa karakter harus diwujudkan secara nyata melalui tahapan-tahapan tertentu. Salah satu tahapan yang dapat dilakukan yaitu membangun karakter melalui pendidikan guna membuat bangsa ini memiliki karakter yang kuat, bermartabat, dan memiliki *great civilitation* Pendidikan memiliki dua tujuan besar yaitu membantu anak-anak menjadi pintar dan membantu mereka

menjadi baik (Lickona, 2013:6). Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sarana strategis dalam pembentukan karakter karena mempunyai tujuan melahirkan insan yang cerdas dan berkarakter. Hal tersebut pernah dikatakan oleh Martin Luther King, yaitu: *intelligence plus character "that is the goal of true education"* (kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya Muslich, 2011: 75). Paparan tersebut mengingatkan bangsa Indonesia dalam mewujudkan pendidikan yang sesungguhnya. Bukan hanya terpaku pada kepintaran, namun membantu anak-anak menjadi baik harus menjadi prioritas.

Upaya mendidik anak-anak menjadi pribadi yang baik, perlu diwujudkan bersama sebagai prioritas dalam hubungan kerjasama antara keluarga, masyarakat maupun pemerintah khususnya melalui bidang pendidikan. Dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tidak cukup hanya memberikan pengetahuan pada siswa, namun juga harus membentuk dan membangun moral siswa agar mampu mengembangkan potensi diri dan

memiliki moral yang baik. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara (dalam Zuriyah, 2007:122) pendidikan tidak hanya sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi pendidikan juga merupakan proses penuliran nilai dan norma serta penuliran keahlian dan keterampilan. Pendidikan nasional Indonesia harus dapat membentuk anak didik seutuhnya menjadi pribadi yang "merdeka jiwanya", "merdeka pikirannya" dan "merdeka tindakannya".

Menanamkan nilai-nilai moral di sekolah dibutuhkan berbagai strategi, agar memunculkan perilaku yang baik bagi siswa. Strategi yang digunakan harus bervariasi, khususnya di SMP. Hal ini karena pembelajaran di SMP dirancang untuk mengembangkan sikap baik dan semangat dalam berkerja tetapi masih tetap mengedepankan pendidikan karakter di sekolah. Mengingat akan pentingnya hal ini maka perlu kiranya strategi-strategi khusus dalam pembelajaran dalam menanamkan nilai-nilai moral pada siswa.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya

untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, trampil, dan berkarakter sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006). Dalam pengamatannya terhadap pengertian PKn, pakar *social studies* dan PKn Indonesia yakni Numan Somantri memberikan batasan pengertian PKn yang dirumuskan sebagai suatu seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan Pendidikan IPS (Somantri, 2001: 59).

PKn merupakan mata pelajaran yang mempunyai fokus utama dalam pembentukan warga negara yang baik (*good citizenship*) dan berkarakter cerdas, trampil, dan berkarakter sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Di sisi lain, tujuan PKn sebagaimana tertuang dalam lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi adalah agar peserta didik memiliki kemampuan: 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi, 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya, 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam pembelajaran PKn, guru perlu memahami bagaimana menentukan model pembelajaran yang mampu mengembangkan pengetahuan wawasan kewarganegaraan (*civic knowledge*). Oleh karena itu penting bagaimana merancang pendekatan, strategi, maupun metode, teknik yang dapat mengembangkan ranah kognitif siswa. Pengembangan *civic knowledge* dalam pembelajaran PKn menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat dan tidak terpisahkan dari dimensi *civic skill* khususnya dalam sub domain *intelektual civic skill*. Keterampilan intelektual tersebut misalnya dalam melakukan kemampuan menganalisis dan mendeskripsikan yang dalam kategori Bloom dikatakan dalam ranah kognitif namun dalam dimensi kompetensi PKn

termasuk dalam ranah *intelektual civic skill* (Lickona, 2013).

HASIL PEMBAHASAN

Pembelajaran yang harus diterapkan di SMP meliputi pembelajaran tuntas (*mastery learning*) untuk dapat menguasai sikap (*attitude*), ilmu pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) agar dapat bekerja sesuai profesinya. Untuk dapat belajar secara tuntas, dikembangkan prinsip pembelajaran *learning by doing* (belajar melalui aktivitas atau kegiatan nyata, yang memberikan pengalaman belajar bermakna), dikembangkan menjadi pembelajaran berbasis produksi, dan *individualized learning* (pembelajaran dengan memperhatikan keunikan setiap individu) dilaksanakan dengan setiap modular.

Nilai pada umumnya dapat mencakup tiga wilayah, yaitu nilai intelektual (benar-salah), nilai estetika (indah-tidak indah), dan nilai etika (baik-buruk). Nilai-nilai ini dijadikan landasan, motivasi bagi manusia dalam menerapkan prilakunya. Keputusan memang untuk melakukan suatu hal yang diambil dengan berdasarkan atas pertimbangan nilai yang dimilikinya. Dwiyanto dkk

(2005) merumuskan perbedaan cara pandang dalam memahami nilai yang telah berimplikasi pada perumusan definisi nilai.

Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Definisi ini dikemukakan oleh Orden Allport (2013) sebagai seorang ahli psikologi kepribadian. Nilai itu terjadi pada wilayah psikologis yang disebut keyakinan, seperti hasrat, motif, sikap, keinginan, dan kebutuhan. Selanjutnya menurut Kuoerman (2005) Nilai merupakan patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif, definisi ini memiliki tekanan utama pada norma sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. Jadi salah satu bagian terpenting dalam proses pertimbangan nilai (*value judgement*) adalah melibatkan nilai-nilai normatif yang berlaku di masyarakat.

Affifudin dkk (2009) mengkaji nilai-nilai moral yang berlandaskan pada tiga prinsip dasar, yaitu prinsip kemerdekaan, kesamaan dan saling menerima. Ketiga prinsip tersebut sebagai landasan seseorang dalam berfikir dan bertindak maka dapat melahirkan perilaku

moral yang tinggi dan menuju pada kepribadian yang baik. Perilaku moral sebenarnya sesuatu yang tersembunyi dalam pikiran seseorang karena tersimpan dalam cara berpikirnya. Moralitas merupakan sistem nilai tentang bagaimana seseorang seharusnya hidup secara baik sebagai manusia. Moralitas terkandung dalam aturan hidup bermasyarakat dalam bentuk petuah, nasihat, peraturan, dan perintah yang diwariskan secara turun temurun melalui agama atau kebudayaan tertentu. Moralitas adalah seluruh kualitas perbuatan manusia yang dikaitkan dengan baik dan buruk.

Kholberg (2007) mengemukakan bahwa perkembangan tingkat pertimbangan moral dipengaruhi oleh suasana moralitas di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat luas. Lingkungan rumah tangga (keluarga) dan lingkungan sekolah merupakan bagian dari lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan tingkat pertimbangan moral. Faktor internal, perkembangan moral tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan intelektual tetapi dipengaruhi juga oleh faktor jenis kelamin. Menurut Kohlberg (2007) Penalaran moral dilihat sebagai

isi, maka sesuatu dikatakan baik atau buruk akan sangat tergantung pada lingkungan sosial budaya tertentu, sehingga sifatnya akan sangat relatif. Tetapi jika penalaran moral dilihat sebagai struktur, maka dapat dikatakan bahwa ada perbedaan penalaran moral seorang anak dengan orang dewasa, dan hal ini dapat diidentifikasi tingkat perkembangan moralnya.

Strategi penanaman nilai-nilai moral di sekolah merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan untuk meningkatkan pertimbangan moral siswa, dan meningkatkan kemampuan berfikir moral secara maksimal, dengan begitu siswa bisa mengukur perbuatan yang dilakukan itu sudah baik atau masih buruk. Dalam hal ini Ki Buntarsono dan Yulianingsih (2007:123) bahwa pendidikan seharusnya diarahkan agar tidak hanya mengajar intelektual saja. Akan tetapi, moral anak didiknya juga harus diperkuat. Jika yang dikejar hanya intelektualnya saja maka dinamakan pengajaran, tetapi jika yang diajarkan intelektual dan moralnya maka hal itu sebagai pendidikan. Pembentukan moral adalah tugas pengajaran budi pekerti. Hal ini didukung oleh pernyataan Ki Hajar Dewantara (2007:123), bahwa pengajaran

budi pekerti tidak lain adalah mendukung perkembangan hidup anak, lahir dan batin dari sifat kodratnya menuju kearah peradaban dalam sifatnya yang umum.

Penanaman nilai-nilai moral sangatlah penting, karena segala sesuatu yang diprogramkan di sekolah bertujuan untuk membentuk anak berpikir tentang isu-isu yang benar dan salah, baik dan buruk, mengharapkan perbaikan sosial serta membantu siswa agar mampu berperilaku berdasarkan nilai-nilai moral. Pernyataan ini memperkuat pandangan Plato (dalam Sjarkawi, 2008:45) yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia cerdas dan baik. Oleh karena itu, adanya pendidikan moral di sekolah merupakan suatu hal yang tak dapat dielakkan Ryan (dalam Sjarkawi, 2008: 45). Pendidikan moral itu mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan mengatasi konflik dan perilaku yang baik, jujur, dan penyayang.

PENUTUP

Penanaman nilai-nilai moral dalam pendidikan harus disesuaikan dengan konsep pendidikan dan harus melalui pembelajaran tuntas, belajar terbimbing dan belajar mandiri. Guru

memiliki peranan penting dalam upaya menanamkan nilai moral siswa. Hubungan siswa dengan guru, siswa dengan orang tua, dan guru dengan orang tua siswa menjadi strategi utama dalam upaya menanamkan nilai moral. Guru juga harus memiliki strategi khusus dalam melakukan pendekatan dan pembelajaran pada siswa di SMP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidinsyah. (2011). "Urgensi Pendidikan Karakter Dalam Membangun Peradaban Bangsa Yang Bermartabat". *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI Kalimantan*, Februari 2011 (Vol. 3 Nomor 1). Hlm. 1-8.
- Afifuddin & Saebani, Beni Ahmad. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arwiyah, M. Yahya, et. al. (2013). *Regulasi Kewarganegaraan Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Cholisin. (2005). "Pengembangan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) dalam Praktek Pembelajaran Kurikulum. Berbasis Kompetensi". Diakses dari:
- Dwiyanto, Djoko & Saksono, Ign. Gatot. (2012). *Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila (Negara Pancasila: Agama atau Sekuler;*

- Sosialis atau Kapitalis*). Yogyakarta: Ampera Utama.
- Gafur, Abdul. (2012). *Desain Pembelajaran: Konsep, Model, dan Aplikasinya dalam Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran. Desain Pembelajaran: Konsep, Model, dan Aplikasinya dalam Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kemdiknas. (2010). "Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama". Draf Panduan Guru Mapel PKn.
- Koesoema A. Doni (2007). *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Lickona, Thomas. (2013). *Educating for Character*. New York: Bantam Book.
Diterjemahkan oleh Lita S. *Pendidikan Karakter Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*. Bandung: Nusa Media.
- Moleong, J. Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi* Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muchson AR. (2012). *Penilaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Diktat Kuliah)*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY.
- Muslich, Masnur. (2011). *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pemerintah Republik Indonesia (2010). *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010 – 2025*. Pemerintah Republik Indonesia.